

SKRIPSI

**PEMENUHAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA SEKOLAH
DASAR DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Andalas*

Oleh:

QORI PRICILIA AQILAH

2110112212

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA (PK VII)**



Pembimbing:

1. Dr. Khairani, S.H., M.H

2. Gusminarti, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa Qori Pricilia Aqilah	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang, 24 Januari 2004 b. Nama Orang tua : Iskandar dan Alif Rahmi c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Administrasi Negara e. No. BP : 2110112212	f. Tanggal Lulus : 3 September 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 4 Tahun 1 Bulan i. IPK : 3,93 j. Alamat : Jln Koto Baru No. 90, RT 003 RW 004, Koto Baru Nan XX, Kcc. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat	

PEMENUHAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA SEKOLAH DASAR DI KOTA PADANG

(Qori Pricilia Aqilah, 2110112212, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 85+xi Halaman, 2025)

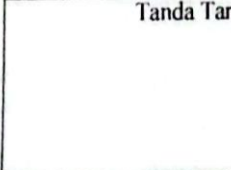
ABSTRAK

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN status guru terbagi atas PNS dan PPPK. Walaupun keduanya termasuk ke dalam ASN namun guru dengan status PPPK masih belum menerima yang menjadi haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masih ada hak guru PPPK di Kota Padang yang belum terlaksana yaitu tunjangan profesi guru yang belum ada kejelasan hingga sekarang. Permasalahan dalam penelitian ini tentang (1) Bagaimana Pemenuhan Tunjangan Profesi Guru yang Berstatus PPPK di Kota Padang? (2) Bagaimana Penyelesaian Pemenuhan Hak Tunjangan Profesi Guru di Kota Padang?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, studi dokumen serta observasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian diperoleh bahwa permasalahan dalam pemenuhan hak tunjangan profesi guru SD PAI PPPK di Kota Padang yaitu tidak terlaksananya hak untuk menerima tunjangan terutama tunjangan profesi guru. Sudah dilakukan upaya penyelesaian dengan melakukan audiensi kepada kepala sekolah dan AGPAII sebagai salah satu organisasi yang berwenang menaungi aspirasi guru PAI di Indonesia. Hak dari guru SD PAI PPPK di Kota Padang yaitu tunjangan profesi guru belum ada kejelasan hingga sekarang sehingga guru SD PAI PPPK di Kota Padang belum menerima hak mereka tersebut, hal ini berbanding terbalik dengan tunjangan profesi guru SMPN TIK PPPK di Kota Padang yang sudah dilakukan secara rutin dan ditransfer ke rekening masing-masing guru yang telah sertifikasi.

Kata Kunci : Guru, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tunjangan

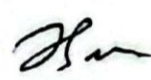
Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 3 September 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	Penguji I	Penguji II
		
Qori Pricilia Aqilah	Romi, S.H., M.H	Amelia Zulfitri, S.H., M.H..

Mengetahui,

Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara : **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni University	Student Name: Qori Pricilia Aqilah	No. Faculty Alumni
	a. Place/Date of Birth : Padang, January 24 th 2004 b. Parents' Name : Iskandar and Alif Rahmi c. Faculty : Law d. Concentration : Administrative Law e. No. BP : 2110112212	f. Graduation Date : September 3 rd 2025 g. Predicate : Cumlaude h. Study Time : 4 Years 1 Month i. GPA : 3,93 k. Address : Jln Koto Baru No. 90, RT 003 RW 004, Koto Baru Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat	

THE FULFILLMENT OF PROFESSIONAL ALLOWANCES FOR GOVERNMENT EMPLOYEE TEACHERS WITH PRIMARY SCHOOL WORK AGREEMENTS IN PADANG CITY

(Qori Pricilia Aqilah, 2110112212, Administration Law, Faculty of Law, Andalas University, 85+xi Pages, Year 2025)

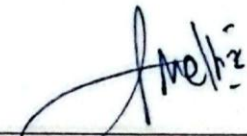
ABSTRACT

Teachers are professional educators with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating students in early childhood education through formal education, primary education, and secondary education. Based on Law Number 20 of 2023 concerning ASN, the status of teachers is divided into civil servants and PPPK. Although both are included in ASN, teachers with PPPK status still do not receive their rights in accordance with the provisions of laws and regulations. There are still PPPK teacher rights in Padang City that have not been implemented, namely the teacher professional allowance which has not been clear until now. The problems in this study are (1) How is the Fulfillment of Teacher Professional Allowances with PPPK Status in Padang City? (2) How is the Fulfillment of Teacher Professional Allowance Rights in Padang City Resolved? The research method used is empirical juridical, namely comparing existing norms with facts in the field. Data collection techniques use interviews, document studies and observations which are then analyzed qualitatively. The nature of the research is descriptive analysis. The results showed that the problem in fulfilling the right to professional allowances for SD PAI PPPK teachers in Padang City is the non-implementation of the right to receive benefits, especially teacher professional allowances. Efforts have been made to resolve the problem by conducting hearings with the principal and AGPAII as one of the organizations with the authority to resolve the problem. The rights of PPPK PAI elementary school teachers in Padang City, namely teacher professional allowances, have not been clarified until now so that PPPK PAI elementary school teachers in Padang City have not received their rights, this is inversely proportional to the professional allowances of PPPK ICT SMPN teachers in Padang City which have been carried out routinely and transferred to the accounts of each teacher who has been certified.

Keywords: Teachers, Civil Servants, Government Employees with Employment Agreements, Allowances.

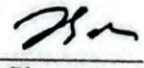
This Minor Thesis has defended in front of the examiner team at September 3rd, 2025.

Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
		
Qori Pricilia Aqilah	Romi, S.H., M.H.	Amelia Zulfitri, S.H., M.H..

Acquainted,

Head of the Department of State Administration Law: **Hendria Fithrina, S.H., M.H.**


Signature

Alumni has been registered in the faculty/university under the number:

Faculty/University Officer	
No. Alumni Faculty	Name: Signature:
No. Alumni University	Name: Signature: